



Target Relokasi PKL Januari 2022

■ Pemda DIY Data Perizinan Para Pelaku Usaha di Kawasan Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY menargetkan proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro akan berlangsung Januari 2022 mendatang. Proses pemindahan lapak para pedagang ini akan tetap dilaksanakan meski muncul sejumlah penolakan.

"Kami targetkan seperti itu (relokasi Januari 2022). Ya tahun 2022 lah. Ini jadi komitmen kita bersama tidak hanya pemerintah tetapi para pelaku usaha agar mendapat ruang (berjualan) yang layak," terang Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Sri Nurkatswari, Selasa (30/11).

Relokasi yang dilakukan untuk menata kawasan Malioboro sebagai bagian dari program Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia ke UNESCO ini dikerjakan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan Pemda DIY.

Pemkot sebelumnya telah melakukan tahap sosialisasi awal. Kemudian, untuk Pemda DIY saat ini baru memasuki tahap pendataan pelaku usaha di kawasan tersebut. Pendataan dilakukan untuk mengetahui PKL yang memiliki izin berjualan di Malioboro. Sebab saat ini dimungkinkan ada banyak PKL baru yang berjualan.

"Kita masih berproses. Jumlahnya kan dari mana yang sudah berizin dan mana yang enggak. Kadang kan juga ada PKL yang baru. Ini kami lagi berproses," terangnya.

Sisi selanjutnya, nantinya PKL akan direlokasi di bangunan eks bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata DIY. Menurutnya, relokasi tersebut tidak akan merugikan PKL. Saat ini pihaknya tengah melakukan kajian agar dua spot relokasi tersebut bisa digunakan dengan nyaman oleh pelaku usaha maupun wisatawan.

Bangunan juga akan dibuat dengan pendekatan estetik. Dengan demikian, tempat baru tersebut dapat menarik kedatangan pelancong. Jadi apa yang dilakukan pemerintah tidak akan menjerumuskan masyarakat. Ini skema-skema ini yang terus kita gaduk agar mereka tidak merugi," jelasnya.

Sisi memastikan, saat ini-

bangunan di eks bioskop Indra sudah siap ditempati PKL dan pedagang kuliner. Sedangkan, bangunan di bekas kantor Dinas Pariwisata DIY baru disiapkan agar bisaampung secepatnya.

"Nanti akan menjadi komitmen kita bersama bahwa kita menata itu bukan hanya pemerintah tetapi juga para pelaku usaha. PKL akan mendapatkan ruang ruang yang layak," ungkapnya.

Mendadak
Ketua Paguyuban PKL Malioboro Tridharma Rudiarto menuturkan, pemberitahuan terkait relokasi PKL itu tergolong mendadak dan mengejutkan pihaknya. Menurutnya, Pemkot Yogyakarta memang telah menggelar sosialisasi belum lama ini.

Namun pihaknya merasa dikejutkan. Menurutnya, undangan sosialisasi dikembalikan mendadak. Dia pun menduga bahwa undangan sosialisasi itu merupakan hasil akhir dari konflik PKL dengan salah satu pemilik toko di Malioboro beberapa waktu lalu.

"Kemarin itu kami ada masalah dengan (toko) gelato karena pemilik toko kan memang kursi yang ada di tempat lapak PKL, sehingga tidak bisa berjualan, saya pikir undangannya soal keputusan itu karena beberapa kali mediasi masih jalan buntu, sehingga persoalan itu kemudian diangkat ke Pemkot lewat Disbud," ujarnya.

Tridharma pun mengambil sikap untuk menolak kebijakan relokasi tersebut. Bukan tanpa alasan, mengingat kondisi anggota Tridharma yang berjumlah 918 PKL belum sepenuhnya pulih akibat epidemi Covid-19.

Rudi pun pesimis lokasi baru yang disiapkan pemerintah tak akan seramai di tempat semula mereka berjualan. Hal tersebut otomatis akan membahayakan mereka secara ekonomi. "Karena kita sudah selama dua tahun kena dampak pandemi begitu mulai ekonomi bergerak dan belum apa-apa sudah dilakukan relokasi. Tentu kita mengambil sikap menolak karena kondisi anggota kami, apalagi belum tentu di tempat yang baru penghasilannya bagus," kata dia.

Wakil Ketua Paguyuban Handayani, Sukirno, mengatakan, untuk sementara ini mereka masih syok atas munculnya program pemerintah yang ingin merelokasi para pedagang. Pria berusia 50 tahun itu menuturkan, undangan sosialisasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, yang diterima hanya melalui sambungan telepon.

Dalam sosialisasi itu, lanjut Sukirno, nantinya seluruh PKL di Jalan Malioboro akan dipindahkan di bangunan bekas bioskop Indra yang letaknya masih di kawasan Jalan Malioboro. Sayangnya, sebagian pedagang tidak menyetujui rencana itu, termasuk 60 pedagang kuliner dari Paguyuban Handayani.

"Di kami itu ada 60 pedagang, ya mau dipindah ke sana semua. Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman dan kami keberatan," ungkapnya.

Sukirno menegaskan, sebaiknya pemerintah menyediakan para PKL di Malioboro daripada membuat program relokasi para pedagang. "Karena biar begini kami tidak menjadi beban pemerintah, kami bisa berjualan mi ayam, soto atau lainnya. Sebaiknya pemerintah berdayakan para pedagang, bukan seperti ini," pungkasnya. (tro/nda)



MULAI BUKA - Sebuah warung pecel lele di Jalan Malioboro mulai buka saat siang hari, Senin (29/11) lalu. Pemerintah DIY menargetkan proses relokasi PKL akan berlangsung pada Januari 2022 mendatang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005